

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Adami Chazawi. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*. Raja Grafindo Persada. Jakarta
- Amiruddin dan H. Zainal Asikin. 2006. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- A Zainal Abidin Farid. 2014. *Hukum Pidana 1*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Amir Ilyas. 2012. *Asas-asas Hukum Pidana*. Rangkang Education: Yogyakarta
- Barda Nawawi Arief. 2001. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. PT Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Bambang Sunggono. 2003. *Metode Penelitian Hukum*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Burhan Ashofa. 1996. *Metode Penelitian Hukum*. PT.Rineka Cipta. Jakarta.
- Bambang Waluyo. 2004. *Pidana dan Pemidanaan*. Sinar Grafika. Jakarta.
- D.Schaffmeister dan N. Keijzer. 2007. *Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Darwan Prinst. 1998. *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik*. Djambatan. Jakarta.
- HB Sutopo. 2002. *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Grasindo. Surakarta.
- I Ketut Mertha (dkk.). 2016. *Buku Ajar Hukum Pidana*. Fakultas Hukum Universitas Udayana. Denpasar.
- Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim. 2016. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Kencana. Jakarta.
- Lamintang. 1984. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung.

- Lilik Mulyadi. 2012. *Hukum Acara Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram.
- Moeljatno. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. PT Rineka Cipta. Jakarta.
- Mardjono Reksodiputro. 1993. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kepada Kejahatan Dan Penegakan Hukum Dalam Batas – Batas Toleransi)*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Jakarta.
- Moh. Taufik Makarao. 2004. *Pokok-pokok Hukum Acara Perdata*. PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Mukti Aro, 2004. *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Peter Mahmud Marzuki. 2016. *Penelitian Huku*. Kencana Prenada Media Group. Jakarta.
- Rusli Muhammad. 2007. *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. Citra Aditya. Bandung.
- Romli Atmasasmita. 1996. *Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System) Perspektif Eksistensialisme Dan Abolisionalisme*, Penerbit Bina Cipta. Jakarta.
- 2010. *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Penerbit Kencana. Jakarta.
- Riduan Syahrani. 1998. *Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum*, cet. I. Pustaka Kartini. Jakarta.
- R. Soesilo, 1995, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komenta-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Politeia, Bogor
- 1991. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komenta-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Politeia. Bogor.
- S.R. Sianturi. 1996. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Alumni Ahaem-Petehaem. Jakarta.

- Sudikno Mertokusumo. 2002. *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty. Yogyakarta.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 1985. *Penelitian Hukum Normative Suatu Tinjauan Singkat*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2003. *Penelitian Hukum Normative Suatu Tinjauan Singkat*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Soerjono Soekanto. 2014. *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press. Jakarta.
- Takdir. 2003. *Mengenal Hukum pidana*. Penerbit Laskar Perubahan. Palopo.
- Tien S. Hulukati. 2013. *Delik-Delik Khusus di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Fakultas Hukum Unpas. Bandung.
- Wirjono Prodjodikoro. 2014. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Refika Aditama. Bandung.
- Yahya Harahap. 2000. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Sinar Grafika. Jakarta.

## **PERUNDANG-UNDANGAN**

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
- Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Hakim.

## **JURNAL**

Arief Sidharta, "Kajian Kefilsafatan tentang Negara Hukum", dalam Jentera (Jurnal Hukum), "Rule of Law", Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), Jakarta, edisi 3 Tahun II, November 2004, hal.124-125.

Dahriyanto Imani. *Akibat Hukum Jika Surat Dakwaan Dinyatakan Obscuur Libel Oleh Hakim. Lex Crimen* Vol. V No. 5. 2016. Hal 26.

Mudzakkir, *PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI: TINDAK PIDANA BIASA PENANGANANNYA LUAR BIASA (CORRUPTION COURT: COMMON CRIME WITH EXTRAORDINARY REDUCTION)*, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 8 No. 2 - Juni 2011, hal. 311.

Reza Hidayat, *Penyertaan Dalam Tindak Pidana Korupsi, (Telaah Dalam Kelalaian Dalam Penyertaan Tindak Pidana Korupsil)*, e-Jurnal Katalogis, Volume 3 Nomor 12, Desember 2015, hal. 11.

## **WEB**

DR. M. Syamsa Ardisasmita, DEA, *DEFINISI KORUPSI MENURUT PERSPEKTIF HUKUM DAN E-ANNOUNCEMENT UNTUK TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG LEBIH TERBUKA, TRANSPARAN DAN AKUNTABEL*", (online), Volume 2006, <https://www.kppu.go.id/docs/Artikel/Seminar%20PBJ.pdf>, akses 22 Februari 2022

Eddy OS Hiariej, *Percobaan dan Pembantuan dalam Delik Korupsi*, diakses dari <https://mediaindonesia.com/opini/254394/percobaan-dan-pembantuan-dalam-delik-korupsi> , pada tanggal 15 Februari 2022, pukul 19.00.